

**PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN
TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BUKITTINGGI
SUMATERA BARAT**

SKRIPSI
UNIVERSITAS ANDALAS

Oleh :

VALDINO

Bp : 1210113080

Program Kekhususan :

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

**PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN
TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BUKITTINGGI
SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

VALDINO
Bp : 1210113080

Program Kekhususan :

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dosen Pembimbing :

Pembimbing I : Hj. Sri Arnetti., SH., MH
Pembimbing II : Lerri Pattra., SH., MH



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

No. Reg. 514/PK.VIII/1/2017

**PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PELANGGARAN
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA BUKITTINGGI SUMATERA BARAT
(Valdino, 1210113080, Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas
Andalas Program Reguler Mandiri, 2017)**

ABSTRAK

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 menjelaskan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Pada tanggal 15 Januari 2014 disahkan UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Pasal 1 (1) UU No.5/2014 istilah yang digunakan yaitu Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. PNS dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang No.5/2014 adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang berstatus tetap dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan kebutuhan instansi dan ketentuan Undang-Undang. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukuman disiplin terhadap pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi Sumatra Barat dan permasalahan apa saja yang timbul dalam penerapan hukuman disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi Sumatra Barat. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis (*socio legal research*) yang menekankan pada praktek dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau Perundang-Undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas, dan meneliti norma-norma yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta yang ada dilapangan, atau masyarakat. Hasil penelitian diperoleh bahwa pada tahun 2016 terjadi 28 pelanggaran hukuman disiplin ringan, 11 hukuman disiplin sedang, dan 2 pelanggaran hukuman disiplin yang masih dalam proses pengajuan usulan hukuman ke Inspektorat Jendral berupa disiplin berat. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman disiplin PNS di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi Sumatera Barat sudah sesuai dengan PP No.53/2010 tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun dalam usulan hukum yang diajukan masih terbilang ringan dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan hukuman sanksi disiplin PNS di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi Sumatera Barat adalah tidak valid atau tidak detailnya data terhadap laporan pelanggaran disiplin dan rasa saling segan menyegani antar pegawai untuk menjatuhkan jenis hukuman yang disusulkan. Oleh karena itu disarankan perlu adanya penegakan hukum yang tegas dan pemahaman tentang jenis hukuman disiplin, memberiksn *reward* kepada PNS yang menjalankan dan yang tidak melanggar peraturan tentang disiplin PNS.